

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.

A. Junaedi Karso. 2021. *Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta; Penerbit Samudra Biru.

Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman; Budi Utama.

Darmadi Djufri. 2024. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. I. Malang. Literasi Nusantara Abadi Grup.

E. Fernando M. Manullang. 2019. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta; Kencana.

Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. I. Jakarta; Kencana.

Hendra Irawan. 2023. *Hukum Tata Negara*, Cetakan I, Malang; Literasi Nusantara Abadi Group.

Fadia Arafiq, Retno Mawarini Sukmariningsih, Totok Tumangkar. 2024. *Harmonisasi Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Cetakan Pertama. Semarang; CV. Lawwana.

Iskandar Muda. 2020. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Surakarta; CV. Kekata Group. Hlm. 1-2.

Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cetakan V. Yogyakarta; Mirra Buana Media.

Mirza Nasution, Geofani Mithree Saragih. 2024. *Hukum Tata Negara Indonesia : Pengantar Dasar*. Cetakan Pertama. Jakarta; Kencana.

Merlin Irene Matitaputty, dkk. 2024. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Widina Media Utama.

Neni Sri Imaniyati. Panji Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur; Sinar Grafika.

Ni Ketut Sari Adnyani. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Pertama. Depok; Rajawali Pers.

Rita Kartina dan Atik Krustiyati. 2023. *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan; Damera Press.

Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum “Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang”*. Cetakan Pertama. Jakarta; Kencana.

Satriya Nugraha. 2024. *Buku Referensi Hukum Tata Negara*. Cetakan Pertama. Banjar; Ruang Karya.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti.

Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Cetakan Pertama. Jakarta; Sinar Grafika.

Widodo Dwi Putro. 2024. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2*. Jakarta: Kencana.

ARTIKEL JURNAL

Sufriadi. 2014. *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Bery Azhari, Hananto Widodo. 2016. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dalam Menolak Pengujian Formil Undang-Undang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

Haeril Akbar, Sukardi, Radian Salman. 2025. Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi dan Fasilitas dalam Pengawasan Peraturan Daerah. Amanna Gappa. Volume 33. Nomor 1.

Haposan Siallagan. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Volume 18 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Herdi Munte, C. S. 2021. *Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" Crepido 1. Nomor 1.

Muhammad Hasrul. 2017. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. Amanna Gappa. Volume 25. Nomor 2.

Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Volume 4 Nomor 2.

Zahermann Armandz Muabezi. 2017. Jurnal Hukum dan Peradilan : Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) : Rule Of Law And Not Power State. Volume 6 Nomor 3.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Hendra Poltak Tafonao. 2019. *Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga negara (Edisi Revisi)*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Indah Sari. 2022. Tesis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar

Ariansyah Arman. 2024. *Peran Laskar Pelangi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Lurah Bira Kecamatan Tamalanrea*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sri Astuti.2023. *Pelaksanaan Penerimaan Tenaga Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Makassar*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ PUTUSAN PENGADILAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Wali kota No.32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Apparatur Sipil Negara Sebagai Laskar Pelayan Publik Yang Berintegritas Pada Lingkup Pemerintah Daerah.

SUMBER INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses dari kbbi.web.id

Siti Aminah. 2024. *Laskar Pelangi Pemkot Makassar Bakal Diseleksi Ulang, 7.000 Lebih Akan Dipangkas*. TribunMakassar.com. diakses pada 11 September 2025

Wusqaa, U. 2022. *Honorer Dilarang, Pemkot Makassar Klaim Laskar Pelangi Jadi Outsourcing*. DetikSulsel: detik.com. diakses pada 10 September 2025.

Muhammad Said. 2022. *Dihapus 2023, Pemkot Makassar Gantikan Tenaga Honorer Jadi Laskar Pelangi*. Sonora.Id. diakses pada 23 September 2025.